Jurnal Riset Ilmu Akuntansi
Vol. 7 Nomor 2, September 2026
ISSN: 2798-7434 (Online)
ISSN: 2747-2256 (Cetak)

IMPLEMENTASI SISTEM E-BPHTB DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Nurul Qalbi Insaniah[1], Nurul Fuada[2], Indriana[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: nurulqalbiinsaniah@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pelayanan perpajakan daerah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sistem Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem E-BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis implementasi E-BPHTB menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM) melalui indikator efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-BPHTB mempermudah dan mempercepat proses pelayanan serta verifikasi, menyediakan informasi transaksi secara lebih transparan, dan meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan serta jejak transaksi secara digital. Jumlah transaksi BPHTB meningkat dari 7.303 transaksi pada tahun 2022 menjadi 9.168 transaksi pada tahun 2024. Realisasi penerimaan BPHTB juga melampaui target pada periode tersebut. Dengan demikian, implementasi E-BPHTB mendukung peningkatan penerimaan BPHTB dan PAD melalui perbaikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perpajakan daerah.

Kata kunci: E-BPHTB, pendapatan asli daerah, technology acceptance model, efisiensi, transparansi, akuntabilitas

ABSTRACT

Digital transformation in local tax services is needed to improve the efficiency, transparency, and accountability of tax administration. One form of this transformation is the implementation of the Electronic Land and Building Acquisition Duty (E-BPHTB) system. This study aims to analyze the implementation of the E-BPHTB system in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) at the Regional Revenue Agency of Gowa Regency. This study employed a descriptive qualitative method using primary and secondary data collected through interviews, observations, and documentation. The implementation of E-BPHTB was analyzed using the Technology Acceptance Model (TAM) framework through three indicators: efficiency, transparency, and accountability. The findings show that the implementation of E-BPHTB facilitates and accelerates service and verification processes, provides more transparent access to transaction information, and improves accountability through digital transaction records and audit trails. The number of BPHTB transactions increased from 7,303 transactions in 2022 to 9,168 transactions in 2024. BPHTB revenue realization also exceeded the targets during the period. Thus, the implementation of E-BPHTB supports the increase of BPHTB revenue and PAD through improvements in the efficiency, transparency, and accountability of local tax services.

Keywords: *E-BPHTB, local own-source revenue, technology acceptance model, efficiency, transparency, accountability*

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, banyak sektor kehidupan yang bertransformasi menuju sistem elektronik. Saat ini, transformasi digital menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dan berbagai organisasi. Namun masih banyak daerah masih mengandalkan sistem manual dalam proses administrasi pengurusan pembayaran pajak sehingga mengakibatkan lambatnya proses verifikasi, pembayaran hingga pelaporan. Hal ini berisiko kehilangan potensi pendapatan dan mengalami kesalahan dalam pengelolaan administrasi. Selain itu, banyak warga yang kurang patuh membayar pajak karena kurangnya informasi dan sulitnya proses pembayaran manual. Banyak warga yang kurang patuh dikarenakan kurangnya Informasi dan pengetahuan tentang pajak (Satriya, 2025). Akibatnya, masyarakat sering tidak memahami pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah mereka. sistem manual ini rentan terhadap kecurangan data dan korupsi, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sistem elektronik (E-sistem) merupakan sebuah sistem yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk mengotomatisasi, menyederhanakan, dan meningkatkan berbagai proses. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses. E-BPHTB adalah singkatan dari Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ini merupakan sebuah sistem atau aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola proses pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara digital. Implementasi E-BPHTB dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut. Sistem elektronik membantu wajib pajak melakukan administrasi pembayaran, pelaporan serta pengawasan dengan integritas dan akuntabel sehingga setiap transaksi tercatat secara digital, hingga dapat meminimalkan risiko kecurangan

Beberapa Penelitian sebelumnya tentang implementasi E-BPHTB di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam, ada yang efektif dan ada yang masih mengalami kendala. Penelitian Lala Azzahra tahun 2023 menunjukkan bahwa, sistem E-BPHTB di UPPD Setiabudi belum optimal dan sosialisasi masih kurang. Dan pada penelitian Lutfi Khorinnisak (2023) menunjukkan bahwa sistem E-BPHTB cukup baik, tetapi ada penurunan efektivitas. Karena belum terdapat penelitian spesifik mengenai implementasi E-BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Teori TAM *(Technology Acceptance Model)* adalah teori yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM menjadi kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi keyakinan, sikap, dan niat pengguna. Keunggulan TAM terletak pada landasan teorinya yang kokoh dan kemampuanya dalam menjelaskan mengapa banyak sistem teknologi gagal diterapkan. *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami mengapa seseorang menerima atau menolak teknologi baru (Wicaksno, 2022).

Sistem Elektronik

Sistem elektronik merupakan rangkaian komponen elektronik yang saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi tertentu atau mengontrol berbagai operasi dalam suatu perangkat (Jamilatulain, 2024). Sistem ini turut mendorong para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka secara

tepat waktu, berkat adanya fitur notifikasi dan pengingat otomatis yang dikirim melalui email atau pesan teks oleh sistem (wafa dan Furqon, 2024). Penggunaan sistem elektronik membawa sejumlah manfaat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Mulai dari akses yang mudah dan antarmuka yang ramah pengguna, perlindungan data yang terjamin, efisiensi dalam pengelolaan administrasi, hingga tersedianya edukasi dan bantuan teknis yang memadai—seluruh aspek ini saling mendukung secara terpadu dalam mendorong wajib pajak agar lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan (Sipahutar dan Tina, 2024).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan di lembaga pemerintah seperti instansi pemerintahan, lembaga layanan publik, dan organisasi non-profit, dengan fokus utama pada pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi penggunaan dana masyarakat. Akuntansi sektor publik memegang peran penting dalam mengelola keuangan negara dan berbagai organisasi publik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang berkualitas. Karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai akuntansi sektor publik sangat dibutuhkan guna mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (rahmayanti *et al*, 224)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan agar pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah berkembang dalam rangka kesejahteraan bagi masyarakatnya

E-BPHTB

E-BPHTB merupakan sebuah layanan secara online atau daring dalam pengelolaan, pemungutan pajak BPHTB berbasis elektronik yang terdiri dari administrasi pelayanan, pelaporan, pembayaran hingga pengawasan. Layanan ini dibuat untuk membantu dan memudahkan wajib pajak dalam pelaporan transaksi dan perhitungan pajak secara online. Aplikasi E-BPHTB merupakan sistem yang dipakai untuk memudahkan pemerintah dalam hal transaksi Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (Amurollah & Aisya 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode Penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme atau interaktif. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya memahami fenomena sejarah mendalam di lingkungan alaminya, dimana peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data. filsafat postpositivisme atau interaktif merupakan pandangan yang menganggap bahwa realitas itu ada secara objektif, namun kita tidak bisa memahami secara mutlak dan sempurna. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa primer dan sekunder yang melibatkan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan antara penerapan sistem E-BPHTB dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) di BAPENDA kabupaten Gowa. Model ini mengasumsikan bahwa penggunaan sistem elektronik ini secara tidak langsung meningkatkan PAD, melainkan melalui serangkaian perbaikan internal. Peningkatan ini dijelaskan melalui 3 indikator yaitu, Efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Indikator tersebut merupakan jembatan logis yang menjelaskan mengapa E-BPHTB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), Jika sistem E-BPHTB berhasil membuat proses menjadi efisien (*Perceived ease of Use)*, lebih dapat dipertangungjawabkan atau akuntabel (*Behavioral Intention to Use)*, serta lebih transparan (*Perceived Usefulness*)), maka hal tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan BPHTB (*Actual Syestem Use).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Impelemtasi E-BPHTB berdasarkan TAM

mplementasi sistem E-BPHTB di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa dianalisis secara mendalam melalui tiga indikator utama yaitu: Efisiensi, Akuntabilitas, dan Transparansi. Ketiga indikator tersebut merupakan jembatan logis untuk mencapai tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator-indikator ini memiliki relasi kuat dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), di mana suksesnya adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaannya.

Tabel 1. Hasil observasi penerapan E-BPTB berdasarkan TAM

No	Indikator	Temuan	Keterangan
1	efesiensi	memudahkan dan membuat waktu dan pelayanan jadi efisien dalam bekerja	Sistem membuat proses menjadi lebih cepat
2	transparansi	wajib pajak bisa melihat riwayat transaksi pajak dan status pengurusan secara real time melalui akun PPAT ataupun PPATS	Sistem lebih terbuka
3	Akuntabilitas	di aplikasi bisa di cek historis transaksi, dan dari transaksi di aplikasi harus sama dengan berkas BPHTB yang diajukan sehingga tidak ada kecurangan	Sistem dapat di pertanggung jawabkan.

Dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator kombinasi antara Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas yang terwujud melalui E-BPHTB mendorong *Actual Syestem Use* (Penggunaan Sistem Aktual), yang merupakan pemicu utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 2. Jumlah transaksi BPBH tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah transaksi	Presentase kenaikan
2022	7.303	-
2023	8.925	22,21%
2024	9.168	2,72%

Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan transaksi berkas BPHTB setelah di terapkan sistem E-BPHTB. Pada tahun 2022 transaksi BPHTB dilakukan sebanyak 7.303 berkas kemudian di tahun berikutnya tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah transaksi yang diproses sebanyak 8.925 transaksi berkas BPHTB dengan kenaikan sebesar 22,21%, dan meskipun pada tahun 2024 transaksi melambat menjadi 9.168 transaksi yang diproses dengan 2,72%, tetapi total transaksi tetap meningkat, hal ini menunjukkan bahwa sistem ini telah mencapai tahap penggunaan aktual yang stabil (*Actual System Use),* yang merupakan pemicu utama dalam peningkatan PAD.

Tabel 3. Target realisasi BPHTB tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	presentase (%)
2022	51.300.000.000	61.732.912.287	120.3
2023	61.400.000.000	68.177.419.196	111.0
2024	61.400.000.000	65.795.520.974	107.2

Penerimaan BPHTB tahun 2022 yang ditargetkan senilai Rp 51.300.000.000 berhasil melebihi target realisasi senilai Rp 61.732.912.287 dengan presentase 120.3 %, kemudian tahun 2023 yang ditargetkan sebanyak Rp. 61.400.000.000 dan berhasil melebihi target secara signifikan senilai Rp 68.177.419.196 dengan presentase 111.0%, dan tahun selanjutnya pada tahun 2024 dengan target Rp 61.400.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp. 65.795.520.974 dengan pesentase 107.2%.

Kenaikan target ini merupakan respons langsung terhadap *over-realization* di tahun 2022. Meskipun realisasi di tahun 2023 (Rp68,1 Miliar) dan 2024 (Rp65,7 Miliar) secara nominal jauh lebih tinggi dari realisasi tahun 2022, persentase pencapaiannya menurun karena target awal telah disesuaikan menjadi lebih tinggi dan lebih realistis (mendekati angka realisasi di tahun sebelumnya), persentase yang menurun bukan berarti kinerja E-BPHTB menurun, melainkan standar keberhasilan yang diukur oleh target telah ditingkatkan setelah efektivitas E-BPHTB terbukti di tahun pertama penerapannya (2022).

Implementasi sistem E-BPHTB pada akhir tahun 2022 menciptakan Efisiensi dan Akuntabilitas yang tinggi secara tiba-tiba. Hal ini memungkinkan Bapenda untuk menyerap *backlog* transaksi yang tertunda di sistem manual dan secara efektif menangkap potensi pajak yang sebelumnya hilang akibat proses yang lambat. Hal ini menghasilkan *over-realization* yang sangat tinggi (120.3%) di tahun 2022.

Setelah potensi BPHTB berhasil diserap secara maksimal, sistem mulai beroperasi pada tingkat efektivitas yang stabil. Meskipun sistem E-BPHTB tetap efektif, dibuktikan dengan kenaikan jumlah transaksi berkas, kinerja *Growth* persentase tidak mungkin terus berada di level 120% setiap tahunnya. Kinerja yang lebih rendah (111.0% dan 107.2%) menunjukkan kinerja stabil yang masih jauh di atas target, namun tanpa adanya lonjakan signifikan dari potensi pajak yang baru ditemukan.

Penurunan persentase realisasi terhadap target dari tahun 2022 ke 2024 bukanlah indikasi kegagalan E-BPHTB. Sebaliknya, hal ini merupakan cerminan dari keberhasilan sistem E-BPHTB itu sendiri dalam mendongkrak penerimaan (realisasi nominal meningkat dari Rp 61,7 Miliar menjadi

Rp 68,1 Miliar dan sekaligus memicu penyesuaian target yang lebih ambisius oleh Bapenda Kabupaten Gowa di tahun-tahun berikutnya

Pembahasan

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem E-BPHTB sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa, dengan menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM). Penerapan sistem elektronik ini dimulai pada akhir tahun 2022 dan mendapat respons yang sangat baik dari staf pelayanan BAPENDA Kabupaten Gowa. Staf pelayanan menyatakan bahwa sistem ini sangat membantu dan mempermudah pekerjaan mereka. Pembahasan ini menguraikan bagaimana tiga indikator utama yaitu, fisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas yang menjadi jembatan logis yang menghubungkan adopsi teknologi dengan peningkatan PAD. Implementasi E-BPHTB di Kabupaten Gowa dapat dijelaskan melalui kerangka TAM, yang berfokus pada *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan) sebagai faktor pendorong adopsi teknologi.

Efisiensi dalam sistem ini dikaitkan erat dengan *Perceived Ease of Use*. Penerapan E-BPHTB terbukti secara signifikan menyederhanakan dan mempercepat alur kerja staf. Proses pengurusan berkas yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih tiga hari pada sistem manual, kini dapat diselesaikan dalam dua hari, bahkan proses peninjauan hanya membutuhkan satu hari jika berkas wajib pajak sudah sesuai. Peningkatan kecepatan dan kemudahan ini secara langsung meningkatkan *Perceived Ease of Use* di mata staf Bapenda, yang kemudian mendorong *Behavioral Intention to Use* (Niat Perilaku untuk Menggunakan) sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

Transparansi mencerminkan *Perceived Usefulness* atau Persepsi Kegunaan sistem. Sistem ini terbukti memberikan kegunaan tinggi karena menyediakan akses informasi secara *real-time* kepada wajib pajak untuk mengecek proses berkas melalui PPAT dan PPATS. Bagi staf, sistem ini memudahkan pelaporan karena data pajak tersimpan otomatis untuk setiap transaksi, yang merupakan kegunaan strategis bagi pemerintah daerah. Transparansi dan kemudahan akses data ini meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi praktik tidak etis, yang merupakan inti dari *Perceived Usefulness*.

Akuntabilitas berperan sebagai hasil dari gabungan *Perceived Ease of Use* dan *Perceived Usefulness*, yang akhirnya memanifestasikan *Behavioral Intention to Use* yang kuat. Akuntabilitas sistem E-BPHTB sangat tinggi karena setiap transaksi tercatat dengan historis yang jelas, dan berkas fisik wajib divalidasi serta dicocokkan dengan data yang terunggah di aplikasi. Mekanisme verifikasi terintegrasi ini menciptakan keyakinan penuh pada staf bahwa "sangat mustahil ada kecurangan". Adanya jejak audit digital juga sangat mempercepat proses audit, memberikan kepastian hukum dan administrasi. Keyakinan kolektif dari wajib pajak dan staf terhadap sistem yang efisien, transparan, dan terjamin keamanannya ini menjadi fondasi Akuntabilitas, mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan seluruh potensi pajak tercatat sebagai *Actual System Use*.

Implementasi E-BPHTB yang tinggi dalam Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas mendorong *Actual System Use* (Penggunaan Sistem Aktual), yang secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah transaksi BPHTB dari 7.303 berkas pada tahun 2022 menjadi 8.925 transaksi pada tahun 2023, mewakili kenaikan sebesar 22,21%. Peningkatan transaksi ini konsisten dengan kenaikan realisasi penerimaan BPHTB yang selalu melampaui target. Secara nominal, realisasi penerimaan meningkat dari Rp61,73 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp68,17 Miliar di tahun 2023, menunjukkan keberhasilan E-BPHTB dalam mendongkrak

penerimaan dan menangkap potensi pajak yang sebelumnya hilang. Meskipun persentase pencapaian terhadap target menurun dari 120,3% (2022) menjadi 107,2% (2024), ini merupakan indikasi keberhasilan E-BPHTB yang memicu penyesuaian target yang lebih ambisius dan realistis oleh Bapenda Kabupaten Gowa

KESIMPULAN

Implementasi Sistem E-BPHTB yang dimulai pada akhir tahun 2022 di Bapenda Kabupaten Gowa terbukti berhasil dan efektif dalam meningkatkan PAD melalui perbaikan kinerja operasional yang signifikan. Keberhasilan ini didukung oleh tiga indikator utama, selaras dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM):

1. Efisiensi (*Perceived Ease of Use*): Proses pelayanan dan verifikasi berkas dipercepat drastis, dari 3 hari menjadi 1-2 hari, yang mempermudah pekerjaan staf
2. Transparansi (*Perceived Usefulness*): Sistem menyediakan akses data *real-time* bagi wajib pajak untuk memantau status berkas, serta memudahkan pelaporan data pajak secara otomatis bagi staf Bapenda.
3. Akuntabilitas Tinggi (*Behavioral Intention to Use*): Adanya jejak audit digital dan mekanisme verifikasi terintegrasi memastikan data aman dan meniadakan kecurangan, yang didukung penuh oleh keyakinan staf.

Implementasi yang sukses ini menghasilkan Peningkatan PAD yang nyata (*Actual System Use*). Penerimaan BPHTB Kabupaten Gowa selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi mencapai 120,3% pada tahun 2022 dan 111,0% pada tahun 2023. Secara nominal, realisasi penerimaan terus meningkat (dari Rp61,7 Miliar di 2022 menjadi Rp68,1 Miliar di 2023). Peningkatan ini didukung oleh kenaikan jumlah transaksi berkas BPHTB, dari 7.303 di 2022 menjadi 9.168 di 2024.

REFERENSI

Amrulloh, A. A., & Aisyah, M. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi,* 2(1), 202-211.

Azimul Wafa, M., & Khoiri Furqon, I. (2024, Desember 9*).* Peran sistem informasi pelayanan pembayaran pajak dalam meningkatkan efektivitas wajib pajak. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan***,** *Vol. 3*(No. 2), 125–132.

Azzahra, L. (2023). Analisis Penerapan Digitalisasi Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dengan Sistem E-Bphtb: Studi Kasus Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah SetiabudI (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).

Jamilatulain. (2024, Agustus 26). Pengertian sistem elektronik. *RedaSamudera.id*. Diakses pada 22 Juni 2025

Khoirinnisak, L. (2023). Analisis Penggunaan Sistem E-Bphtb Dalam Pemungutan Bphtb Terhadap Penerimaan Pajak Bphtb di Kabupaten Temanggung.

Satriya, R. R. (2025). Masalah Dalam Ketidaktaatan Kesadaran Membayar Pajak. Ganesha Civic Education Journal, 7(1), 60–69.

Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024, November 5). Efektivitas e-System dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap transformasi digital dalam sistem perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy***,** *1*(1)

Titin Rahmayanti, V. I. V. I. N., Nazaki, N., & Novi, W. (2023). Implementasi Pelayanan Elektronik-Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (E-Bphtb) Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. CV. Seribu Bintang.